



Media: Republika

Hari: Rabu

Tanggal: 03 November 2021

Halaman: 7

TPS3R tak Efektif Kurangi Sampah ke Piyungan

Ditargetkan, TPST Piyungan hanya menerima sampah 10 persen dari tiap kabupaten/kota.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi sampah yang masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul, DIY. Salah satunya dengan membentuk Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) dan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) di tingkat wilayah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kuncoro Cahyo Aji mengatakan, TPST Piyungan sendiri saat ini menerima sampah mencapai 786 ton per hari. Ada tiga wilayah di DIY yang membuang sampahnya ke Piyungan, yakni Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

TPS3R dan TPS yang dibentuk di tingkat wilayah ini masih kurang efektif untuk mengurangi sampah yang masuk ke Piyungan. Pasalnya, TPST Piyungan sendiri sudah kelebihan kapasitas (*overload*) sejak 2014 lalu. "Tingkat efektivitasnya sebenarnya saat ini belum terlalu signifikan," kata Kuncoro kepada *Republika* melalui sambungan telepon, Selasa (2/11).

Kuncoro menyebut, TPS3R memberi dampak pada berkurang-

nya masalah sosial yang ditimbulkan akibat permasalahan sampah yang tak kunjung selesai di Piyungan. Pasalnya, warga setempat juga sudah beberapa kali melakukan pemblokiran sampah yang masuk. Bahkan warga juga menolak upaya perluasan lahan di Piyungan.

"Kalau (sampah yang masuk) banyak berkurang tentu masalah-masalah sosial juga banyak berkurang dan nanti muncul pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Karena sampah ketika dipilah dengan baik memiliki peluang untuk dijual atau diubah menjadi finansial," katanya.

Untuk meningkatkan keefektifan TPS3R dan TPS di tingkat wilayah, pihaknya membuat gerakan secara besar-besaran. Setidaknya, kata Kuncoro, sampah yang masuk ke TPST Piyungan dapat berkurang secara signifikan. "Di Sleman itu beberapa mau membangun TPS3R dan TPS yang memadai. Di Kota Yogya juga mulai dibangun dan di Bantul ada Program Bantul Bersama. Sehingga Kami mendorong supaya kabupaten/kota itu tetap ada upaya untuk pengelolaan sampahnya," ujarnya.

Termasuk, untuk meminta ma-

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditanggapi

☐ Untuk Diketahui

1.

2.

☐ Positif

☐ Segera

syarakat mengolah sampahnya secara mandiri juga dilakukan. Selain itu, institusi-institusi hingga perguruan tinggi juga didorong dalam mengelola sampahnya sendiri.

Pihaknya berharap, melalui upaya dan gerakan yang dilakukan dapat mengurangi volume sampah yang diterima TPST Piyungan. Ditargetkan, TPST Piyungan hanya menerima sampah 10 persen dari tiap kabupaten/kota.

"Ini masuk dalam Program Gerakan Jogja Bersih, beberapa waktu lalu kami sudah bekerja sama dengan KLHK RI untuk pilah sendiri sampahnya. Itu harus kita kondisikan ke seluruh DIY supaya tidak terlalu banyak yang masuk ke Piyungan, jadi harus ada pengolahan sampah sedekat mungkin dengan sumbernya," jelas Kuncoro.

Gerakan tersebut sudah mulai dijalankan sejak 2021 ini dan akan diintensifkan di 2022, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Pihaknya juga sudah membentuk tim untuk melakukan sosialisasi secara masif dan menyiapkan anggaran. "Kami agak pelan karena pandemi, tapi program sudah jelas. Diharapkan nanti tingkat kepedulian masyarakat pada lingkungan semakin meningkat," katanya menambahkan.

Seperti diketahui, upaya perluasan TPST Piyungan hingga saat ini

juga masih terus dilakukan. Bahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY juga difasilitasi oleh pemerintah pusat untuk menjalankan proyek perluasan TPST Piyungan.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Bramantyo Isdijoso mengatakan, pihaknya telah menerima rencana perluasan TPST Piyungan dari Pemda DIY. Termasuk terkait pembebasan lahan yang direncanakan mulai dilakukan akhir 2021 ini. "Diperkirakan untuk mulainya kira-kira untuk proses persiapannya Desember 2021 sudah mulai nanti (pembebasan lahan)," kata Bramantyo usai audiensi dengan Pemda DIY di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (1/11).

Perluasan lahan direncanakan lebih dari enam hektare. Sedangkan, lahan yang diperluas tidak hanya direncanakan berasal dari Sultan Ground, namun juga tanah milik masyarakat dan tanah kas desa. Pembebasan lahan diperkirakan memakan waktu setidaknya satu tahun. Namun, konstruksi untuk perluasan lahan diperkirakan baru dapat dilakukan pada 2024 mendatang.

"Berproses biasanya bisa setahun, mulai proses pengadaan di 2024 dan mudah-mudahan pertengahan 2024 sudah bisa dimulai konstruksi, karena kita juga mengajak swasta untuk pendanaan," ujarnya. ■ ed: ferman rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005